KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN

NOMOR SOP	**SEK-OT.02.02-80**
TANGGAL PEMBUATAN	**24 JUNI 2025**
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	**1 OKTOBER 2025**
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP :	**PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA LAPORAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer
2. Memahami prosedur monitoring dan evaluasi
3. Memahami ilmu akuntansi
4. Memahami prosedur pelaporan keuangan

KETERKAITAN:

1. SOP Monitoring dan Evaluasi Data Laporan Keuangan serta Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan
2. SOP Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-E1 Sekretariat Jenderal serta Tingkat Kementerian
3. SOP Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK RI
4. SOP Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Kementerian

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Disposisi
4. Jaringan Telekomunikasi

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dijalankan, maka pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan akan terhambat

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA LAPORAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN HUKUM

No	Aktivitas/Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Keuangan	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan	Penyusun Laporan Keuangan	Penyusun Laporan BMN	Jabatan Fungsional Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan menugaskan penyusun laporan keuangan untuk melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN			Mulai				Disposisi	30 menit	Disposisi	
2	Penyusun laporan keuangan melakukan rekonsiliasi data BMN dengan penyusun laporan BMN							Disposisi	1 hari	Data Dukung Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN	
3	Penyusun Laporan Keuangan melakukan analisis data laporan keuangan dan BMN, dan menyusun konsep berita acara rekonsiliasi, serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan untuk mendapatkan persetujuan			T				Data Dukung Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN	1 hari	Konsep Berita Acara Rekonsiliasi	
4	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan menelaah dan menandatangani berita acara rekonsiliasi			Y				Konsep Berita Acara Rekonsiliasi	60 menit	Berita Acara Rekonsiliasi	
5	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan melaporkan hasil rekonsiliasi kepada Kepala Biro Keuangan, serta menyampaikan kepada Jabatan Fungsional Arsiparis untuk didokumentasikan							Berita Acara Rekonsiliasi	30 menit	Berita Acara Rekonsiliasi	
6	Kepala Biro Keuangan melaporkan hasil rekonsilasi kepada Sekretaris Jenderal	Selesai						Berita Acara Rekonsiliasi	30 menit	Berita Acara Rekonsiliasi	